



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI SENIN, 1 APRIL 2013



DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|-----|
| PT. Pelindo III | 1 |
| Terminal Kalibaru | 2 |
| Infrastruktur Jalan | 3-4 |
| Pipa Gas | 5 |
| Kinerja Pelabuhan | 6 |



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDes

2013

☐

Kompas

☐

Republika

☐

Rakyat Merdeka

☐

Suara Karya

☐

Media Indonesia

☐

Sinar Harapan

☐

Seputar Indonesia

☐

Neraca

☐

Koran Tempo

☐

Suara Pembaruan

☐

Investor Daily

☐

Jurnal Nasional

☒

Bisnis Indonesia

☐

Pikiran Rakyat

☐

Kontan

☐

Indopos

☐

Lain-lain,

| Jenis Berita | Topik Berita | Tahun mulai | Tahun selesai | Biaya | Pelaku | Keterangan |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------|--------|-----------------------------|------------|
| Proyek APBS Dimulai September 2013 | - Proyek alur pelayaran barat Surabaya molor hingga September 2013 - Pemindahan pipa Kodeco masih belum dimulai - Pelindo III siapkan anggaran US\$70 juta | 2013 | | US\$70 | PT. Pelabuhan Indonesia III | |

► REVITALISASI TANJUNG PERAK

Proyek APBS Dimulai
September 2013

JAKARTA— PT Pelabuhan Indonesia III menyatakan proyek alur pelayaran barat Surabaya di Pelabuhan Tanjung Perak yang menelan investasi US\$70 juta molor hingga September 2013 dari jadwal semula awal tahun ini.

M. Tahir Saleh
tahir.saleh@bisnis.co.id

Kepala Humas Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Edi Priyanto mengatakan pengunduran proyek itu dipicu kewajiban tender ulang serta belum tuntasnya pemindahan pipa gas milik Kodeco Energy yang melintang di alur tersebut.

Awalnya, dia menjelaskan tender proyek pelebaran dan pendalaman alur pelayaran barat Surabaya (APBS) yang diikuti lima peserta akan dikerjakan pada awal tahun ini.

Namun, dia menambahkan proses tender akhirnya diulang karena hanya dua perusahaan yang mengajukan penawaran yakni PT Pelindo III dan PT Pelabuhan Jawa Timur (PJT) I.

Pelabuhan Jatim I merupakan badan usaha pelabuhan (BUP) swasta yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

"Dari lima [peserta] ada yang minta perpanjangan waktu tapi ternyata hanya dua yakni kami dan Jatim I, ini tidak bisa karena mesti tiga peserta, makanya diulang lagi oleh Ditjen Perhubungan Laut," katanya Jumat (29/3).

Selain masalah minimnya peserta tender, Edi mengatakan kendala lain yakni belum selesainya pemindahan pipa gas milik Kodeco yang melintasi alur tersebut.

Dia menegaskan penanggung jawab yang akan memindahkan pipa Kodeco ialah PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO).

TUNGGU KODECO

Menurutnya, PHE WMO berjanji menuntaskan pemindahan pipa itu pada bulan depan tetapi sampai kini lelangnya belum dilakukan. "Pendalaman dan pelebaran alur itu bisa dilakukan jika pipa tersebut sudah bisa dipindahkan."

Meskipun ditender, katanya,

perseroan mendapatkan hak *right to match* kepada Kemenhub karena sebagai pemrakarsa pengembangan dan pengelolaan alur itu.

Data Pelindo III mencatat alur pelayaran Surabaya yang eksisting sepanjang 25 mil laut dengan lebar 100 m berkedalaman -9,50 meter low water spring (LWS).

Pada tahap pertama, alur itu akan dilebarkan menjadi 150 m dengan kedalaman -13 m LWS. Pada tahap kedua, alur dilebarkan menjadi 200 meter, berkedalaman -14 m LWS dan tahap terakhir ditargetkan kedalaman alur mencapai -16 m LWS.

Dengan kedalaman alur -13 m LWS bisa menangani kapal ukuran 60.000 DWT atau panamax sedangkan kedalaman -14 m LWS bisa menangani kapal ukuran di atas 60.000 DWT atau post panamax.

Edi mengungkapkan pihaknya telah menjalankan segala proses yang terkait dengan proyek itu mulai dari rencana pengembangan, proyeksi, anggaran, sampai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelindo III Husein Latief menyatakan yang paling memungkinkan menyelesaikan masalah pipa Kodeco yakni dengan digeser ke lokasi lain.

Secara teknis, lanjutnya, pipa

► Proyek alur pelayaran barat Surabaya molor hingga September 2013.

► Pemindahan pipa Kodeco masih belum dimulai.

► Pelindo III siapkan anggaran US\$70 juta.

baru dipasang terlebih dahulu lalu disambungkan baik pipa di laut maupun di darat.

"Sebelum disambung itu dipotong pipa lama, pipa barunya ditaruh di kedalaman tertentu, dipotong ujung-ujungnya, lalu disambung. Prosesnya sekitar 3 bulan," katanya.

Bila pipa sudah dipindahkan, perseroan baru bisa memulai pengerjaan pendalaman dan pelebaran alur.

"Kalau Kodeco sudah beres, baru kami melakukan pendalaman dan pelebaran alur, izinnya kan Ditjen Laut, kami prakarsai dengan biaya US\$70 juta dari anggaran perusahaan, bukan negara," katanya.

Pada awalnya, dia mengakui sulit mencari solusi pipa Kodeco karena berisiko tinggi. Gas yang dialirkan di dalam pipa bisa saja terbakar jika ada kesalahan dalam pemindahan. ²



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDes

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☒ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

| Jenis Berita | Topik Berita | Tahun mulai | Tahun selesai | Biaya | Pelaku | Keterangan |
|---|--|-------------|---------------|-------|----------------|------------|
| Tunggu Kalibaru Selesai, Turunkan Dwelling Time | <div>- Penurunan dwelling time ini menjadi keharusan, karena arus peti kemas di Tanjung Priok meningkat tajam setiap tahunnya</div> <div>- Jika dwelling time berhasil diturunkan menjadi 3 hari, kapasitas pelabuhan Tanjung Priok akan naik lagi</div> <div>- Kementerian Perhubungan juga berkomitmen mendukung upaya mempersingkat waktu pergerakan barang atau peti kemas</div> | | 2014 | | PT. Pelindo II | |

Tunggu Kalibaru Selesai, Turunkan Dwelling Time

JAKARTA – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino mengakui dwelling time masih menjadi persoalan di pelabuhan Tanjung Priok. Sirkulasi barang dari sejak kapal sandar di dermaga hingga keluar pintu pelabuhan membutuhkan waktu 6,2 hari.

Akibatnya, barang banyak menumpuk di pelabuhan, kapasitas jadi sulit ditingkatkan. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan oleh importir juga jadi lebih besar. Ujung-ujungnya, barang-barang impor itu jadi lebih mahal ketika sampai di pasaran.

Lino menegaskan, pihaknya berkomitmen menurunkan dwelling time dari saat ini 6,2 hari menjadi 3 hari saja. Barang yang datang harus cepat keluar, sehingga kapasitas di dalam pelabuhan bisa meningkat signifikan.

"Penurunan dwelling time ini menjadi keharusan, karena arus peti kemas di Tanjung Priok meningkat tajam setiap tahunnya. Dalam dua tahun terakhir peningkatannya mencapai 21 persen, atau dua kali lipat dari GDP (gross domestic product)," kata Lino.

Dia melanjutkan, peningkatan arus peti kemas itu menuntut pening-



BERMASALAH: PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II mengakui dwelling time masih menjadi persoalan di Pelabuhan Tanjung Priok. Sirkulasi barang dari kapal ke pintu pelabuhan membutuhkan waktu 6,2 hari.

katan kapasitas pelabuhan setiap tahunnya. Padahal tidak mungkin Pelindo II memperluas pelabuhan setiap tahun. Saat ini memang BUMN pelabuhan ini tengah mengembangkan pelabuhan Tanjung Priok dengan membangun Terminal Kalibaru yang super modern.

Tapi tahap pertama pembangunan terminal kelas dunia itu baru akan selesai 2014. Salah satu terminal yang akan lebih dulu selesai berkapasitas 1,5 juta TEUs. "Sementara menunggu terminal 1 selesai, kita ingin meningkatkan kapasitas pelabuhan dengan menurunkan dwelling time menjadi 3 hari," kata Lino.

Sejak 2008, Pelindo II telah berhasil meningkatkan daya tampung pelabuhan hingga dua kali lipat, meskipun belum ada pembangunan terminal baru. Itu dilakukan dengan peningkatan produktivitas kerja dan efisiensi. Kapasitas tampung peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada 2008 hanya 3,8

juta TEUs, dan di tahun 2012 naik drastis menjadi 7,2 juta TEUs.

Jika dwelling time berhasil diturunkan menjadi 3 hari, kapasitas pelabuhan Tanjung Priok akan naik lagi. Tapi menurut Lino, menurunkan dwelling time memang tidak mudah karena memerlukan koordinasi antar instansi dalam mempermudah dan mempercepat proses pengurusan dokumen. Pihak-pihak yang terkait adalah otoritas pelabuhan, Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Badan Karantina Kementerian Pertanian.

Kementerian Perhubungan juga berkomitmen mendukung upaya mempersingkat waktu pergerakan barang atau peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Upaya itu dilakukan bekerja sama dengan pihak pengelola pelabuhan, pengguna jasa, dan instansi pemerintah yang terkait di pelabuhan.

"Harapannya, penurunan dwelling time sudah dapat terlihat mulai April 2013 ini," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby Manahit akhir pekan kemarin.

Dia menjelaskan, salah satu formula yang diterapkan adalah dengan mengeluarkan kontainer-kontainer kosong yang sudah sejak lama tertumpuk di pelabuhan. Selain itu, berbagai kontainer impor yang berisi muatan yang telah menyelesaikan dokumen akan dengan segera dikeluarkan dari pelabuhan ke tempat tujuan yang ditetapkan.

Dengan secepatnya kontainer keluar dari pelabuhan, maka ketersediaan lahan penumpukan semakin tinggi, sehingga kapal-kapal yang membawa kontainer bisa segera melakukan kegiatan bongkar peti kemas. (dri)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☒ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

| Jenis Berita | Topik Berita | Tahun mulai | Tahun selesai | Biaya | Pelaku | Keterangan |
|--|---|-------------|---------------|---------------|---|------------|
| Jalan Maruga – Ciater Selesai Desember | <div><div>- Dalam maket pembangunan, ruas jalan tersebut terdiri dari 4 lakur yang dibagi menjadi dua ruas jalan</div><div>- Nantinya jalan tersebut akan menjadi percontohan dari ruas jalan yang ada di Kota Tangel</div><div>- Tidak akan ada lagi tiang-tiang PLN ataupun kabel telepon yang bergelantungan. Semua akan ditanam di bawah tanah karena sudah disiapkan utilitas di samping jalan</div></div> | | 2013 | Rp. 34 miliar | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan | |

Jalan Maruga-Ciater Selesai Desember

Jadi Jalan Percontohan di Tangerang Selatan

TANGSEL-Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Tangel menarget pelebaran Jalan Maruga-Ciater sepanjang 2 Kilometer (Km) rampung Desember 2013 mendatang. Saat ini, Dinas BMSDA masih menunggu pembebasan lahan selesai dilakukan Dinas Tata Kota.

Kepada **INDOPOS**, Kabid Bina Marga Kota Tangel, Aries Kurniawan mengatakan, pihaknya menarget pelebaran ruas jalan Maruga-Ciater selesai akhir tahun ini. Dalam maket pembangunan, ruas jalan tersebut terdiri dari 4 lajur yang dibagi menjadi dua ruas jalan. Selain itu juga akan ada jalur khusus sepeda dan pedestrian.

"Anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 34 miliar untuk membangun ruas jalan sepanjang 2 Km," ujar Aries.

Masih menurut Aries, nantinya jalan tersebut, akan menjadi percontohan dari ruas jalan yang ada di Kota Tangel. Karena tidak akan ada lagi tiang-tiang PLN ataupun



JADI CONTOH: Pelebaran Jalan Ciater-Maruga ditargetkan selesai Desember 2013 ini.

kabel telepon yang bergelantungan. Semua akan ditanam di bawah tanah karena sudah disiapkan utilitas di samping jalan.

"Saat ini kami tinggal menunggu penyelesaian pembayaran lahan warga yang dibebaskan oleh Dinas Tata Kota. Setelah itu selesai, kami akan langsung melakukan pembangunan. Saat ini pun kami sudah melakukan pengerukan beberapa lahan warga yang sudah dibebaskan," katanya.

Kasi Perencanaan Teknik Dinas BMSDA Kota Tangel, Hendri Sumawijaya menambahkan, selain pelebaran jalan, pihaknya juga akan meninggikan jembatan yang melintas di Kali angke, Kelurahan Ciater. Jembatan tersebut nantinya akan ditinggikan sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter dengan lebar yang disesuaikan dengan lebar jalan. **(fin)**



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDes

KompasRepublikaRakyat MerdekaSuara Karya

Media IndonesiaSinar HarapanSeputar IndonesiaNeraca

Koran TempoSuara PembaruanInvestor DailyJurnal Nasional

Bisnis IndonesiaPikiran RakyatKontanIndopos

Lain-lain,

2013

| Jenis Berita | Topik Berita | Tahun mulai | Tahun selesai | Biaya | Pelaku | Keterangan |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------|-------|--------|------------|
| Maros-Parepare Harus Tuntas Tahun Ini | <div><div>- Keterlambatan pengerjaan di picu lambannya pembebasan lahan dan penangguhungan proses lelang</div><div>- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional menetapkan kontraktor baru untuk merampungkan Maros-Parepare</div><div>- Maros-Parepare adalah jalur distribusi utama dari kota Makassar menuju daerah di utara Sulawesi Selatan</div></div> | 2008 | | | | |

INFRASTRUKTUR JALAN

Maros-Parepare Harus Tuntas Tahun Ini

MAKASSAR, KOMPAS — Jalan trans-Sulawesi Maros-Parepare, Sulawesi Selatan, yang dibangun sejak 2008 hingga kini belum juga diselesaikan. Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendesak agar pembangunan jalan trans-Sulawesi itu segera diselesaikan tahun ini juga. Alasannya, mulai tahun depan, Kementerian PU tak akan lagi mengalokasikan anggaran pembangunan jalan sepanjang 150 kilometer itu.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Sulawesi Nurdin Samaila, Minggu (31/3), mengemukakan, kebijakan pemerintah pusat itu karena biaya pembangunan yang membengkak hingga Rp 300 miliar atau lebih dari Rp 1 triliun pembiayaannya. Padahal, saat dibangun lima tahun lalu, jalan selebar 12 meter, yang sebagian besar permukaannya berupa beton, itu diperkirakan Rp 794 miliar selama tiga tahun.

"Karena lambat dikerjakan, proyek molor hingga dua tahun. Kementerian Pekerjaan Umum akan mengalihkan anggaran Ma-

ros-Parepare untuk proyek infrastruktur lain," kata Nurdin.

Keterlambatan pengerjaan di picu lambannya pembebasan lahan dan penguluhan proses lelang. Saat ini masih ada 1,1 kilometer jalan yang belum bisa dibangun dan tersebar di tiga kabupaten, yakni Maros, Pangkep, dan Barru. Sekitar 70 persen di antaranya terdapat di Pangkep, terutama di sepanjang Kecamatan Labakkang hingga Ma'rang.

Meski jalan yang belum dibangun tersisa sedikit, persoalan ini bukan hal sepele sebab menyangkut ganti rugi pembebasan lahan. H Baharuddin (50), warga Labakkang, mengaku kecewa dengan harga Rp 35.000 per meter persegi yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Jumlah itu jauh lebih rendah dari permintaan warga setempat sebesar Rp 150.000 per meter persegi.

"Kami tak menentang pembangunan jalan asalkan ganti ruginya sepadan," katanya.

Menurut Nurdin, pemerintah pusat mengeluarkan lebih dari Rp 50 miliar untuk membantu

pembebasan lahan selama dua tahun. Sebanyak Rp 12 miliar kembali dikucurkan tahun ini untuk mempercepat pembebasan lahan. Selain itu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional juga menetapkan kontraktor baru untuk merampungkan Maros-Parepare.

"Kinerja kontraktor lama tak memuaskan. Kini, proyek Maros-Parepare dikerjakan kontraktor asal Korea Selatan yang bekerja sama dengan kontraktor nasional dan lokal," ujar Nurdin yang berharap langkahnya bisa mempercepat proyek.

Maros-Parepare adalah jalur distribusi utama dari Kota Makassar menuju daerah di utara Sulawesi Selatan (Sulsel) ataupun seluruh provinsi di Sulawesi. Poros ini menopang distribusi berbagai komoditas unggul Sulsel dari sentra penghasil menuju Makassar.

Hamid Paddu, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, mengemukakan, lambannya pengerjaan jalan Maros-Parepare menyebabkan kerugian biaya operasional kendaraan. (RIZ)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

2013

☐ Kompas

☐ Republika

☐ Rakyat Merdeka

☐ Suara Karya

☐ Media Indonesia

☐ Sinar Harapan

☐ Seputar Indonesia

☐ Neraca

☐ Koran Tempo

☐ Suara Pembaruan

☐ Investor Daily

☐ Jurnal Nasional

☒ Bisnis Indonesia

☐ Pikiran Rakyat

☐ Kontan

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

| Jenis Berita | Topik Berita | Tahun mulai | Tahun selesai | Biaya | Pelaku | Keterangan |
|-----------------------------------|--|-------------|---------------|-------|--------|------------|
| Pipa Trans-Jawa Agar Gunakan APBN | <div>- Pembangunan infrastruktur melalui skema komersial sulit diwujudkan</div> <div>- Wacana penunjukan langsung pasokan gas ke PGN peroleh resistensi</div> <div>- Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia meminta dilibatkan program konversi BBM</div> | | | | | |

PASOKAN GAS

Pipa Trans-Jawa Agar Gunakan APBN

JAKARTA—Di tengah-tengah semakin meningkatnya kebutuhan gas untuk memenuhi kebutuhan industri, baik di Jawa maupun di Sumatra, pembangunan jaringan pipa trans-Jawa dan Sumatra diusulkan menggunakan dana APBN.

Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nur Pamudji mengemukakan pembangunan pipa trans-Jawa dan trans-Sumatera sebaiknya dibangun oleh pemerintah melalui dana APBN. Pasalnya, bila pembangunan infrastruktur dibangun secara

Pembangunan infrastruktur melalui skema komersial sulit diwujudkan.

Wacana penunjukan langsung pasokan gas ke PGN peroleh resistensi.

Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia meminta dilibatkan program konversi BBM.

komersial, akan banyak kendala yang datang. "Kalau kami harus menunggu Pertamina atau PGN yang menyelesaikan, ya lama. Selain itu juga ada hitungan ekonominya," ujarnya Kamis (28/3). Menurut dia, pihaknya akan siap menjadi pembeli gas bila semua infrastruktur terbangun. Pasalnya, yang terjadi selama ini adalah gas sulit dialirkan lantaran infrastruktur gas untuk menyalurkan sampai ke PLN kurang memadai. Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini, dalam roadmap-nya, pemerintah Indonesia sedang membangun jalur pipa gas yang terintegrasi dari Barat Sumatra sampai Timur Jawa. Tujuannya ketersediaan infrastruktur dan pasokan gas untuk mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi. Adapun roadmap tersebut, pemerintah telah menentukan timeline pembangunan

infrastruktur gas. Selain itu, muncul juga wacana agar PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) memperoleh keistimewaan dalam memperoleh pasokan gas. Namun, adanya wacana itu langsung mendapatkan respons yang negatif dari sejumlah pihak.

Tidak Layak Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto menilai PGN tidak layak memperoleh keistimewaan untuk mendapatkan alokasi gas bumi melalui mekanisme penunjukan langsung dari pemerintah. "Gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis dan karenanya sesuai UUD dikuasai negara, sehingga tidak layak keistimewaan itu diberikan kepada PGN yang sebagian sahamnya dimiliki swasta," katanya di Jakarta, Minggu (31/3). Hal senada dikemukakan pengamat energi Komaidi Notonegoro. "Idealnya keistimewaan diberikan kepada BUMN yang 100% dimiliki pemerintah," kata Wakil Direktur Reforminer Institute itu. Menurutnya, sebagai BUMN yang sebagian sahamnya dimiliki swasta, posisi PGN memang sulit dan dalam beberapa hal kerap memperoleh perlakuan standar ganda. Dia mencontohkan, ketika berencana menyesuaikan harga, PGN berargumentasi sebagai aksi

Infrastruktur Gas yang Segera Digelar

| Nama | Operator | Penyelesaian |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| Revitalisasi LNG Arun | Pertamina | Selesai Kuartal IV 2014 |
| Pipa Arun-Belawan | Pertamina | Selesai Kuartal II 2014 |
| FSRU Lampung | PGN | Selesai 2014 |
| FSRU Jawa Barat | PT Nusantara Regas | Sudah beroperasi |
| FSRU Jawa Tengah | Pertamina | Selesai kuartal IV 2014, |
| Pipa Cirebon-Bekasi | Pertagas | Selesai Kuartal IV 2014 |
| Pipa Cirebon-Semarang | Rekin & Pertamina | Selesai Kuartal III 2014 |
| Pipa Gresik-Semarang | Pertagas | Selesai Kuartal III 2014 |
| Pipa Kepodang-Tambaklorok | Bakrie and Brothers | Selesai 2014 |

Sumber: dari berbagai sumber diolah

Silva/Wahana

korporasi yang mewakili kepentingan investor termasuk swasta. "Namun sekarang, PGN meminta keistimewaan yang mestinya hanya diberikan kepada perusahaan 100% milik pemerintah," katanya. Meski demikian, Komaidi menambahkan, itu semua kembali kepada pemerintah yang tentunya juga sudah memiliki pertimbangan tertentu bila berencana memberikan keistimewaan kepada PGN untuk memperoleh alokasi pasokan gas melalui mekanisme penunjukan langsung. Pada, saat rapat dengan Komisi VII DPR, Dirut PGN Hendi P Santoso meminta pemerintah memberi kewenangan kepada perseroan untuk mendapatkan pasokan gas melalui mekanisme penunjukan langsung. Kewenangan itu diyakini akan makin meningkatkan bisnis PGN ke depan. Berkaitan dengan kelanjutan program konversi BBM ke BBG, Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia (APCNGI) meminta pemerintah melibatkan swasta dalam menjalankan program konversi BBM ke BBG. Ketua APCNGI Danny Praditya mengatakan salah satu indikator sukses dalam menjalankan program konversi BBM ke BBG adalah terjalannya infrastruktur gas secara menyeluruh. Namun, yang terlihat saat ini, pembangunan infrastruktur gas masih belum signifikan. (Fitriana Hidayat)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDes

2013

☐ Kompas

☐ Republika

☐ Rakyat Merdeka

☐ Suara Karya

☐ Media Indonesia

☐ Sinar Harapan

☐ Seputar Indonesia

☐ Neraca

☐ Koran Tempo

☐ Suara Pembaruan

☐ Investor Daily

☐ Jurnal Nasional

☒ Bisnis Indonesia

☐ Pikiran Rakyat

☐ Kontan

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

| Jenis Berita | Topik Berita | Tahun mulai | Tahun selesai | Biaya | Pelaku | Keterangan |
|---|---|-------------|---------------|-------|--------|------------|
| Arus Kontainer di Flores Melonjak 55 % | <div>- Lonjakan arus peti kemas itu didorong besarnya potensi hasil bumi di Pulau Flores sejak 2010</div> <div>- Sejumlah perusahaan pelayaran berencana meningkatkan kapal melalui pelabuhan Maumere, Flores</div> <div>- Hambatan utama bongkar muat di pelabuhan itu dipicu tenaga kerja bongkar muat (TKBM) belum mau melaksanakan kegiatan 24 jam. Kondisi itu menyebabkan kegiatan bongkar muat peti kemas di pelabuhan tidak bisa dilakukan secara cepat</div> | 2013 | | | | |

► KINERJA PELABUHAN

Arus Kontainer di Flores Melonjak 55%

JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia III mencatat peningkatan arus peti kemas di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur hingga 55% pada 2012 menjadi 15.789 *twenty-foot equivalent units*.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Edi Priyanto mengatakan lonjakan arus peti kemas itu didorong besarnya potensi hasil bumi di Pulau Flores sejak 2010.

"Berdasarkan data arus bongkar muat melalui Pelabuhan Maumere setiap tahun mengalami tren peningkatan," katanya kepada *Bisnis Sabtu* (30/3).

Pada 2010, dia memaparkan arus peti kemas dari dan menuju Pulau Flores hanya 5.786 *twenty-foot equivalent units* (TEUs) sedangkan pada 2011 meningkat menjadi 10.178 TEUs.

Edi mengharapkan pengiriman barang menggunakan peti kemas pada tahun ini bisa meningkat lagi dengan adanya berbagai potensi hasil bumi asal Flores.

Sejauh ini, hasil bumi andalan Pulau Flores yang sering dikirim ke berbagai daerah seperti kopra, kacang mete, kopi, dan cokelat.

Edi menambahkan sejumlah perusahaan pelayaran berencana meningkatkan pelayanan kapal melalui pelabuhan Maumere, Flores.

Sedikitnya, tiga operator pelayaran peti kemas domestik telah menyatakan komitmennya akan meningkatkan kinerja pelayanan bongkar muat yakni PT Meratus Line, PT Taruna Kusan Explosive dan PT

Timur Asri Laut.

PT Meratus Line merupakan operator yang pertama yang membuka pelayanan angkutan peti kemas domestik melalui Pelabuhan Maumere sejak 2010.

PT Pelayaran Alkan Abadi, tuturnya, juga sudah mengirim surat ke PT Pelindo III Cabang Maumere pada 27 Maret 2013 untuk melakukan kegiatan perdana bongkar muat kontainer di Pelabuhan Ende pada pertengahan bulan April 2013.

Pelabuhan Ende merupakan Pelabuhan yang masuk di wilayah kerja Pelindo III Cabang Maumere.

Edi menyatakan pihaknya masih menemui beberapa hambatan dalam pengiriman peti kemas domestik di pelabuhan Maumere meskipun pengiriman peti kemas menunjukkan tren peningkatan.

Hambatan utama bongkar muat di pelabuhan itu dipicu tenaga kerja bongkar muat (TKBM) belum mau melaksanakan kegiatan 24 jam. Kondisi itu menyebabkan kegiatan bongkar muat peti kemas di pelabuhan tidak bisa dilakukan secara cepat.

Dia menambahkan biaya buruh TKBM juga masih mahal mencapai Rp300.000 per peti kemas, sedangkan daya dukung industri di wilayah Maumere juga masih kurang banyak.

Selain itu, ketersediaan dermaga di pelabuhan juga masih terbatas sehingga dermaga digunakan bergantian dengan kapal jenis lain seperti penumpang dan *general cargo*. (Henrykus F. N. Wido)